

PEMBANGUNAN AGROINDUSTRI DALAM MENGERAKKAN PEREKONOMIAN

Unggul Priyadi

Abstract

Economic crisis striking Indonesia nowadays should be treated seriously. Trying to recover the Indonesian economy, government has no choice other than strengthening the fundamental of the Indonesian economy. Beside that, as this article extends, government should search for new potential sectors. This article extends that among the possible choices, agri-industry is the potential one. This article argues that agri-industry does not demand for costly import content. Beside that, Indonesia has all it needs to develop this sector; for instance Indonesia has potential areas to develop.

This article discusses the development of agri-industry in Indonesia. This article finds that to date, economic policies held by the government have not support the development of the sector yet. Based on the finding, this article extends proposals to develop the sector ahead.

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang dikembangkan selama PJP I tidak dapat dipertahankan secara terus menerus setelah perekonomian dihadapkan pada krisis moneter yang telah menjelma menjadi krisis perekonomian. Pemerintah terpaksa harus menerima kenyataan bahwa industri yang dikembangkan tidak mendasarkan pada *resource base* yang dimiliki. Pertumbuhan sektor industri ternyata kurang mampu menciptakan *trickle down effect* pada sektor pertanian sebagai sektor pendukung. Sektor industri yang tumbuh dengan cepat ternyata hanya memberikan manfaat semu bagi perekonomian domestik, terlebih bagi pertumbuhan perekonomian wilayah. Kondisi ini telah memaksa pemerintah mengadakan reorientasi kebijakan pembangunan yang menempatkan sektor pertanian sebagai sektor pendukung.

Manfaat positif dengan adanya depresiasi rupiah yang mencapai 300 % dibandingkan pada nilai kurs awal tahun 1997 yang diharapkan mampu meningkatkan volume ekspor ternyata tidak sepenuhnya dapat terwujud, namun justru

menciptakan *vicious circle* yang semakin kusut dan runyam. Kinerja ekspor, khususnya non migas yang selama ini mengandalkan pada produk tekstil, pengolahan kayu, elektronika, kulit dan barang kulit serta besi baja, mesin dan otomotif ternyata harus rela melepaskan kesempatan yang ada. Hal ini disebabkan kemampuan ekspor yang ada selama ini masih memanfaatkan dan berlindung pada kebijakan pemerintah serta kandungan impornya tinggi, sehingga sektor ini pun terkena dampak negatif ketika terjadi depresiasi rupiah yang sangat tinggi.

Dengan adanya kondisi yang tidak menguntungkan ini, maka sasaran ekspor harus di reorientasi, dari potensi ekspor yang kandungan impornya tinggi menuju pada potensi ekspor yang hanya sedikit kandungan impornya, atau bahkan yang tidak mempunyai kandungan impor. Di antara berbagai pilihan potensi yang ada, maka sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong ekspor dalam situasi saat sekarang adalah agroindustri. Berdasarkan aspek spesial, maka beberapa wilayah di Sulawesi sebagai penghasil coklat, kopi serta beberapa wilayah

lain penghasil kelapa sawit dan udang mampu berkembang dengan bertumpu pada potensi kekayaan agrobisnis dan tetap berkembang saat dihadapkan krisis ekonomi.

PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN: SUATU RETROSPEKSI

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unik bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kurun pembangunan 1945-1997 dapat digolongkan ke dalam dua periode yaitu periode 1945-1966 dan periode 1966-1997. Pada periode pertama (1945-1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan, pada umumnya mengalami kegagalan, yang dicirikan antara lain oleh: (1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita, (2) relatif sejangkanya distribusi kesejahteraan di antara berbagai kelompok masyarakat, (3) infrastruktur pembangunan, (4) tidak berkembangnya sosiostruktur, (5) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara yang kronis dan (6) terjadinya inflasi yang tidak terkendali (Luftni Nasution, 1994).

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebabkan antara lain oleh: (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilakukan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan, (2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan politik tidak stabil dan sukarnya merencanakan kebijakan fiskal dan moneter, (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang, (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan ekonomi yang memadai, dan (5) kebijaksanaan pembangunan ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional.

Pengalaman pahit yang cukup lama diderita bangsa Indonesia di masa lalu memberi pelajaran berharga dalam rangka

memformulasikan usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat itu hanya dapat dicapai dengan upaya yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, (2) adanya mekanisme redistribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan, (3) adanya stabilitas politik yang dinamik, dan (4) adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

Pada periode kedua pembangunan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal dan moneter. Di samping itu, sasaran dan tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan yang seksama, dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dikenal sebagai Repelita dan dituangkan dalam rumusan GBHN.

Repelita I (tahun 1969/70-1973/74) difokuskan pada rehabilitasi ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian terutama pangan, rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengembangan institusi petani. Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui penghematan anggaran belanja negara, reformasi fiskal dan moneter serta bantuan luar negeri. Hampir seluruh sasaran peningkatan produksi pertanian tercapai. Anggaran pembangunan tahunan sepanjang periode ini meningkat hampir tiga kali, dan Produk Domestik Bruto meningkat rata-rata 8,6 % per tahun.

Tujuan utama dari Repelita II (1974/75-1978/79) adalah (1) meningkatkan ketersediaan pangan, pakaian dan bahan bangunan, (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur, (3) memperbaiki dan memperluas mekanisme redistribusi kesejahteraan, dan (4) menciptakan kesempatan kerja. Prioritas diberikan kepada pembangunan pertanian dan pedesaan. Pertumbuhan PDB dan PDB per kapita pada periode tersebut masing-masing mencapai rata-rata 6,8 % dan 4,2 %

per tahun. Rata-rata tingkat pertumbuhan PDB Sektor Pertanian sebesar 3,4 % per tahun sedangkan produksi beras meningkat kira-kira 3,8 % per tahun. Pada periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasembada beras semakin besar.

Repelita III (1979/80-1983/84) difokuskan untuk menerapkan strategi trilogi pembangunan. Kebijakan ekonomi terutama ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah yang relatif tertinggal, (2) meningkatkan pendapatan golongan ekonomi lemah, (3) membentuk dan mengembangkan koperasi terutama di pedesaan (4) meningkatkan produksi pangan utama, dan (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum.

Pada periode ini kebijakan dipusatkan pada pengembangan beberapa industri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal sebagai bagian integral penerapan strategi "pendalaman struktur industri". Sebagai konsekuensi kebijakan ini mulai terjadinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dan pengembangan industri.

Repelita IV (1985/85 - 1988/1989) pembangunan difokuskan pada pengembangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai tambah terhadap sumberdaya domestik. Perubahan prioritas ini dinilai cukup rasional karena swasembada beras yang mendekati 100 % telah dicapai pada tahun 1984. Hanya saja, kebijakan yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri belum diterapkan secara konsisten.

Repelita V (1988/89 - 1993/94) difokuskan untuk diversifikasi ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada minyak dan gas bumi, melalui pengembangan industri yang berorientasi ekspor. Pada periode ini sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor terbesar, akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB

telah turun dari kira-kira 27,2 % pada tahun 1989/90 menjadi 19,8 % pada tahun 1993/94. Sektor industri memberikan pangsa relatif terhadap PDB pada Repelita V telah meningkat dari 14,4 % menjadi 16,9 %.

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional terutama ditujukan untuk: (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas, (2) melakukan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan kecil, dan (3) meningkatkan keseimbangan Kawasan Timur Indonesia.

KONTIBUSI AGRIBISNIS TERHADAP PEROLEHAN DEvisa

Di tengah kemelut krisis ekonomi yang terus menimpa perekonomian nasional, tekanan terhadap defisit transaksi berjalan terus menerus semakin berat. Sektor migas yang selama ini menjadi andalan memperoleh devisa, dalam perkembangannya sudah tidak mampu lagi sebagai andalan meraup perolehan devisa. Adanya realitas ini, sektor non migas dituntut untuk mampu menggeser keberadaan sektor migas yang merupakan *non renewable resources*. Sektor non migas yang sangat berpeluang untuk menggantikan perolehan devisa tidak lain adalah agribisnis.

Ilustrasi peran sektor non migas dalam memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa yang terus mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir tergantikan oleh sektor non migas, yakni pada tahun 1990/1991 sektor non migas mampu memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa sebesar 45,4 % maka dalam tahun 1998/1999 hanya memberikan kontribusi sejumlah 14,1 % (perhatikan tabel 1).

Mencermati realitas tersebut sektor migas dalam memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa rata-rata per tahun mengalami penurunan sejumlah 3,91 %. Kondisi sebaliknya, dalam kurun waktu yang

sama sektor non migas yang pada awal tahun 90-an hanya mampu memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa 54,6% maka pada akhir tahun 90-an mampu memberikan kontribusi 85,9 %. Hal ini berarti tiap tahun sektor non migas secara rata-rata mengalami peningkatan perolehan devisa sejumlah 3,91 %.

Sektor non migas yang mampu memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa dengan kecenderungan yang terus mengalami peningkatan tidak lain adalah

agrobisnis. Agrobisnis mencakup sektor pertanian dan industri-industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian, serta industri-industri pengolahan hasil pertanian termasuk di dalamnya perdagangan. Memasuki awal krisis ekonomi tahun 1997, komoditas sektor pertanian mencapai perolehan devisa terbesar dibandingkan komoditas sektor industri dan komoditas hasil tambang di luar migas (perhatikan tabel 2).

Tabel 1
Nilai Ekspor 1989/1999
(dalam juta US \$)

Tahun Anggaran	Migas		Bukan Migas		Jumlah	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(5)
1990/1991	12.763	45.4	15.380	54.6	28.143	100
1991/1992	10.706	36.0	19.008	64.0	29.714	100
1992/1993	10.480	29.7	24.823	70.3	35.303	100
1993/1994	9.334	25.6	27.170	74.4	36.504	100
1994/1995	10.445	24.8	31.716	75.2	42.161	100
1995/1996	10.616	22.2	37.138	77.8	47.754	100
1996/1997	12.771	24.5	39.267	75.5	52.038	100
1997/1998	10.238	18.2	45.924	81.8	56.162	100
1998/1999	7.123	14.1	34.565	85.9	50.688	100

Sumber: *Nota Keuangan dan APBN 1999/2000*

Tabel 2
 Nilai Ekspor Bukan Minyak Bumi dan Gas Alam 1989/1990 - 1998/1999
 (dalam juta US \$)

Jenis Barang	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1997/1998 Apr-Agust	1998/1999*) Apr-Agust	%tase Perubahan (7)-(6)@5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(6)@5
I. Hasil-hasil pertanian	2.970.9	2.896.5	3.478.5	1.349.5	1.559.1	+15.5
1. Getah karet	50.5	35.8	29.4	14.3	9.7	-32.2
2. Kopi	623.6	590.0	511.8	286.0	239.9	-16.1
3. Udang (segar/beku)	1.028.9	1.020.3	1.005.5	623.4	491.7	+16.1
4. The	96.9	117.2	83.6	43.1	46.9	+8.8
5. Lada hitam	87.6	31.1	42.9	28.7	9.0	-68.6
6. Lada putih	67.0	59.5	119.7	41.4	19.0	-54.1
7. Tembakau	67.4	77.5	111.4	38.7	53.0	+37.0
8. Biji coklat	237.7	258.2	294.9	121.2	195.0	+60.9
9. Gaplek (manioc) I)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
10. Ikan tuna dan lainnya	366.8	362.3	418.5	170.2	151.9	-10.8
11. Ubur-ubur/kerang lainnya	62.3	46.1	38.1	19.5	16.0	-17.9
12. Lainnya	282.2	298.5	822.7	163.0	327.0	+100.6
II. Hasil-hasil pertanian	30.038.0	32.740.1	35.880.7	14.613.1	15.057.4	+3.0
1. Kayu lapis	3442.3	3.700.5	2.999.2	1.545.7	893.0	-42.2
2. Kayu gergajian	443.9	482.6	312.6	176.3	66.6	-62.2
3. Kayu olahan lain	1.064.0	1.061.9	2.124.7	534.7	854.2	+59.8
4. Timah (unwrought)	255.9	277.7	267.6	113.8	124.0	+9.0
5. Aluminium (unwrought)	474.5	409.9	426.5	177.5	144.8	-18.4
6. Pakaian Jadi	3.444.3	3.669.6	2.564.5	1.434.0	1.265.2	-11.8
7. Kain tenun	1.573.7	1.617.8	1.152.6	651.0	590.9	-9.2
8. Tekstil lainnya	1.311.2	1.431.0	3.907.7	997.1	1.398.3	+40.2
9. Karet olahan	2.237.0	2.180.3	1.781.4	795.2	689.2	-13.3
10. Bungkil kopra	28.5	46.9	35.5	16.1	6.5	-59.6
11. Minyak atsiri	83.8	76.9	105.8	46.6	51.8	+11.1
12. R o t a n	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	-
13. Minyak kelapa sawit	795.1	806.8	1.324.2	619.8	293.3	-52.7
14. S e m e n	14.8	11.5	51.7	21.2	33.9	+59.9
15. Stearin	162.0	57.8	20.5	5.1	65.3	+1.180.4
16. Barang anyaman	68.0	61.6	33.3	21.0	6.8	-67.6
17. Meubel (rotan, kayu, bamboo)	889.9	952.5	620.7	411.6	142.8	-65.3
18. Bahan kimia	574.8	585.3	799.7	333.9	463.9	+38.9
19. Alat-alat listrik	2.839.3	3.774.4	3.615.4	1.529.3	1.445.8	-5.5
20. Kulit dan barang dari kulit	70.0	61.1	179.5	45.9	61.7	+34.4
21. Pupuk urea	299.0	268.4	306.7	152.6	81.4	-46.7
22. Kertas dan barang dari kertas	932.4	987.7	1.036.4	483.6	644.7	+33.3
23. Kaca dan barang dari kaca	205.0	228.7	117.2	79.0	54.4	-31.1
24. Alas kaki (kulit, karet,kanvas)	2.086.5	2.234.8	1.276.3	723.2	547.6	-24.3
25. Lainnya	6.742.1	7.754.4	1.082.9	3.698.9	5.131.1	+38.7
II. Hasil-hasil pertanian	2.823.0	3.098.1	3.065.2	1.435.0	1.073.5	-25.2
1. Biji-biji tembaga	1.635.8	1.613.4	1.438.9	715.5	559.8	-21.8
2. Biji-biji nikel	43.4	44.0	37.0	16.5	9.8	-40.6
3. Bauksit	10.6	8.6	11.0	4.4	3.7	-15.9
4. Biji-biji timah (tin)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
5. Batu bara	1.016.7	1.298.3	1.457.0	625.7	486.1	-22.3
6. Lainnya	116.5	133.8	121.3	72.9	14.1	-80.7
IV. Hasil-hasil lainnya	1.4	47.2	487.4	484.8	0.5	-99.9
J u m l a h	35.833.3	38.781.9	42.911.8	17.882.4	17.690.5	-1.1

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 1999/2000

Dalam kondisi depresiasi rupiah yang sangat kuat, memberikan dampak terhadap komoditas ekspor yang berbasis pada sumberdaya lokal. Sebagai ilustrasi, pada periode April-Agustus 1998 komoditas-komoditas yang mengalami peningkatan ekspor antara lain: udang (segar/beku) 16,1 %, teh 8,8 %, tembakau 3,7 %, dan biji coklat 60,9 %. Peningkatan nilai ekspor komoditas-komoditas ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume ekspor komoditi bersangkutan. Peningkatan nilai ekspor teh disebabkan oleh meningkatnya harga komoditi tersebut di pasar internasional, mengingat dalam periode tersebut volume ekspor teh mengalami penurunan.

Kemampuan mengembangkan agroindustri sebagai perolehan devisa sangat mempunyai implikasi yang sangat luas dalam perekonomian, sehingga mampu memberikan "*multiplier effect*" yang besar bagi perekonomian nasional. Hal ini disebabkan komoditas-komoditas tersebut mempunyai *backward linkage* yang kuat pada tataran perekonomian lokal dan *local content* yang tinggi.

Di samping komoditas pertanian yang mampu meningkatkan perolehan devisa, terdapat pula komoditas yang mengalami penurunan seperti: getah karet 32,2 %; kopi 16,1 %; lada hitam 68,6 %; lada putih 54,1 %; ikan tuna dan lainnya 10,8 % serta ubur-ubur/kerang lainnya 17,9 %. Penurunan nilai ekspor komoditi-komoditi tersebut salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya volume ekspor komoditi bersangkutan. Di samping faktor internal tersebut, faktor lain yang perlu memperoleh perhatian adalah adanya tingkat kompetisi dari komoditas yang dihasilkan negara-negara anggota ASEAN (perhatikan tabel 3).

Realitas ini harus menjadikan perhatian semua pihak dalam upaya mendorong pengembangan agribisnis yang merupakan

andalan ekspor perekonomian nasional. Pada gilirannya, agribisnis akan mampu memberikan keamanan dan ketahanan pangan, penyediaan kesempatan kerja dan berusaha, dan pengentasan kemiskinan serta pengendalian inflasi.

Keinginan membangun agribisnis yang saat ini masih bertumpu pada kelimpahan sumber daya (*factor-driven*) harus ditransformasi kepada sektor agribisnis yang didorong oleh investasi (*investment-driven*), kemudian berlanjut pada dorongan inovasi (*innovation driven*). Dengan kondisi ini produk agribisnis yang dihasilkan akan bergeser dari produk yang bersifat *unskilled* dan *natural resources intensive* kepada *product skilled labour and capital intensive* yang kemudian pada produk *skilled labour and knowledge intensive*.

PENDEKATAN SISTEM AGRIBISNIS

Cara pandang baru terhadap sektor pertanian dengan melihat pertanian sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi mutlak harus dilakukan. Hal tersebut terutama apabila dikaitkan dengan adanya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah dapat bersaingnya berbagai produk Indonesia dengan produk-produk yang dihasilkan dari produsen negara-negara lain.

Arah pembangunan pertanian dihadapkan pada reorientasi yang mengarah pada peningkatan pendapatan petani. Melalui nuansa baru tersebut, pemerintah menggulirkan strategi tersebut dalam deregulasi pertanian. Petani dibebaskan untuk menanam komoditi yang menurut petani paling menguntungkan. Namun demikian, kebijaksanaan ini juga belum menjadi kebijaksanaan pemerintah yang dipegang oleh semua aparat dari atas sampai ke bawah. Hal ini bisa dipahami mengingat telah begitu dominannya kebijaksanaan berorientasi peningkatan produksi.

Tabel 3
Hasil Pertanian Terpenting di Negara-Negara Asia Tenggara
(1996 tidak termasuk beras)

Negara	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
Thailand	Gula Tebu	Tapioka Akar	Jagung	Karet	Kelapa
Malaysia	Minyak Palem	Biji Palem	Karet	Kopra	Minyak Kelapa
Indonesia	Singkong	Jagung	Gula Tebu	Minyak Palem	Kentang Manis
Phillippines	Gula Tebu	Kelapa	Biji Jagung	Pisang	Karet
Vietnam	Kelapa	Jagung	Kopi	Karet	The
Laos	Kentang Manis	Singkong	Jagung	Kentang	
Myanmar	Gula Tebu	Pala	Bijan/ Lenga	Jagung (Biji)	Gram

Sumber: JETRO (*Asean in Figures*)

Ketika bangsa Indonesia memasuki PJP II, terdapat perubahan lingkungan global, khususnya dengan lahirnya GATT. Perjanjian ini membuat produsen dari setiap negara saling berhadapan satu sama lain. Produsen dari suatu negara nantinya tidak lagi dapat berlindung di balik baju proteksi ketika harus bersaing dengan produsen negara lain.

Lingkungan global ini memaksa setiap pemerintah untuk menyesuaikan kebijaksanaannya. Setiap negara harus memproduksi komoditi yang mempunyai keuntungan komparatif sehingga negara tersebut dapat bersaing dengan negara lain. Namun, keuntungan komparatif ini adalah dalam pengertian keuntungan komparatif dinamis, sehingga setiap negara perlu merumuskan kebijaksanaan industrialisasinya agar arah pengembangan komoditi andalannya menjadi jelas.

Dengan mendasarkan pada "*resource base*" yang ada, maka agroindustri sangat mungkin dapat dikembangkan menjadi salah satu andalan Indonesia karena di Indonesia tersedia bahan baku yang melimpah. Di samping itu, agroindustri juga sangat strategis untuk dikembangkan karena keter-

kaitannya yang tinggi dengan sektor lain, sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang besar dan memperbaiki distribusi pendapatan serta mengatasi kemiskinan di pedesaan. Agar keuntungan agroindustri ini dapat menjadi kenyataan, maka perlu adanya keterkaitan yang jelas dalam pengembangan agroindustri dengan sektor pertanian. Agroindustri perlu dibawa ke distrik-distrik pertanian dan ikut dimiliki oleh petani.

Dalam upaya mewujudkan pemahaman sektor pertanian ke dalam sistem yang terintegrasi, pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian pada tahun 1994 membentuk Badan Agribisnis sebagai pemekaran badan yang sudah ada, yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian. Adapun direktorat yang ada tetap mendasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian nomor: 560/Kpts/ OT.210/8/1990 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian yang menyatakan bahwa Departemen Pertanian dibagi dalam beberapa direktorat dan badan. Direktorat direktorat ini adalah Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan. Pembentukan

direktorat didasarkan pada komoditi (pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan), kesamaan fungsi (pendidikan dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan) dan program Bimas.

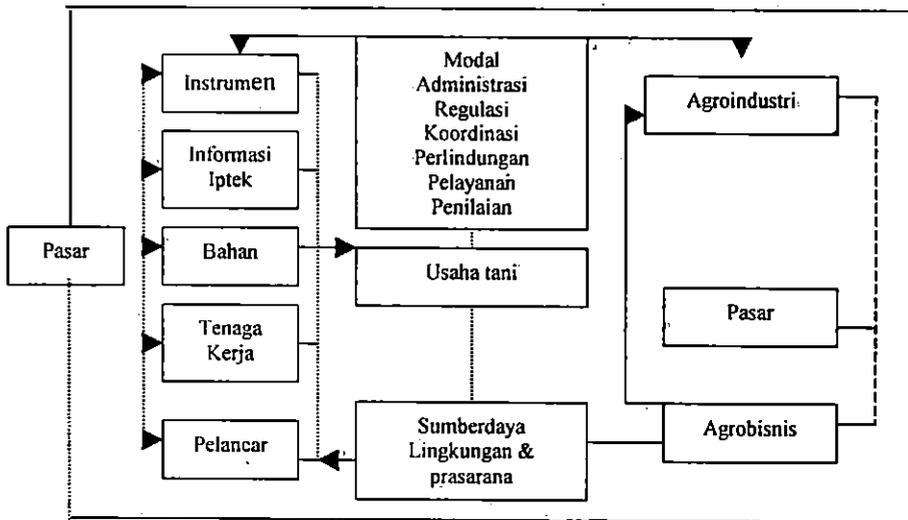
Cara pandang agribisnis sebagai suatu sistem merupakan permulaan yang baik bagi perkembangan sektor pertanian. Melalui pendekatan agribisnis yang merupakan suatu kesatuan usaha di bidang pertanian yang berbasis di pedesaan, sektor ini mempunyai posisi, daya tawar, serta tampil mandiri guna menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas secara kontinyu. Selain itu, juga mempunyai dinamika untuk memanfaatkan peluang dan isyarat pasar. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa unit agribisnis bukan merupakan suatu unit pemilikan, akan tetapi merupakan unit satu kesatuan sistem yang tersusun atas beberapa komponen yang merupakan jaringan terpadu untuk meraih nilai tambah ekonomi (Jafar, 1994).

Sistem agribisnis secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas mulai dari

pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani dan agroindustri yang terkait satu dengan yang lainnya (Badan Agribisnis, DEPTAN 1994). Oleh karenanya, sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem, yaitu (a) pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumber daya pertanian, (b) budidaya atau usaha tani, pengolahan hasil pertanian, (c) pemasaran hasil pertanian, (d) prasarana dan (e) pembinaan. Secara skematis pendekatan Sistem Agribisnis dapat diungkapkan secara singkat (lihat Skema Sistem Agribisnis).

Kenyataan di atas merupakan suatu kajian yang menarik mengingat bahwa petani sebagai pelaku langsung proses produksi pertanian harus dapat mengorganisir dirinya. Apabila di tingkat petani tidak diperkuat dengan suatu pola kelembagaan tersendiri, kemungkinan yang akan terjadi adalah petani akan semakin tertinggal.

Gambar 1
Sistem Agribisnis



Sumber: Deptan, 1994

STRATEGI PEMBANGUNAN AGRIBISNIS

Upaya untuk mewujudkan pengembangan agribisnis harus diusahakan supaya berlangsung melalui suatu proses tertentu yang dirancang dan direkayasa secara sadar untuk menjamin keberhasilan dengan efektif dan efisien. Proses tersebut merupakan proses manajemen dari masyarakat agribisnis guna membentuk, menumbuhkan, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan sistem agribisnis sesuai dengan potensi dan karakteristik lingkungan hidup setempat.

Dalam upaya pengembangan agribisnis ini perlu dilandasi paradigma acuan agar proses manajemen operasional yang dikembangkan pada setiap komponen sistem atau sub sistemnya dapat berlangsung secara serasi, di mana pun atau kapan pun sistem ini berada. Strategi umum pengembangan agribisnis diarahkan agar perekonomian dapat menjadi pertanian yang bercirikan agribisnis (*agribusiness base economic*). Di samping itu, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian sebagai kegiatan yang memimpin kegiatan yang lain (*post harvest industry lead development strategy*) (Bungaran, 1993).

Bertolak dari kompleksitas fenomena agribisnis, maka rumusan strategi pengembangan agribisnis PJP II berlandaskan kepada apa yang sudah diletakkan dan dibangun pada PJP I. Salah satu strategi yang telah berhasil mengantarkan pembangunan pertanian selama ini adalah strategi kesemestaan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan transformasi pertanian/pedesaan menjadi bagian integral dari sistem nasional yang dinamik. Dalam strategi tersebut dikembangkan pola kebijakan: diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi di mana dalam penyelenggaraannya ditopang sistem paket program terpadu, seperti paket Bimas dan PIR. Melalui strategi tersebut, terwujud kondisi pertanian/pedesaan yang secara struktural sudah terjangkau oleh berbagai lembaga ekonomi

nasional yang diperlukan untuk meningkatkan produksi/produktivitas.

Memasuki era PJP II, sangat mendesak untuk melakukan reorientasi atas strategi di atas, dengan usaha untuk seoptimal mungkin menghasilkan nilai tambah dan kemampuan bersaing dalam alam pasar terbuka dan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian-penyesuaian strategi, terutama dengan meningkatnya kehandalan kelembagaan sektor hilir dari usahatani, karena di sinilah letak kelemahan pertanian dalam meraih nilai tambah yang maksimal. Strategi baru ini tetap bertolak dari kesemestaan agar pertanian yang sudah mengalami transformasi dapat terus mengembangkan proses restrukturisasi pedesaan. Dengan adanya strategi ini maka wawasan dan sistem agribisnis akan memperoleh lingkungan strategik yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan.

Untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan strategis dalam pengembangan agribisnis yang kondusif melalui restrukturisasi pedesaan, perlu dikembangkan empat pilar penopang sistem agribisnis, yang meliputi: (1) Eksistensi Semua Komponen Sistem Agribisnis Secara Lengkap di Pedesaan, (2) Wirausaha dan Kemitraan Usaha, (3) Iklim Lingkungan yang Kondusif, dan (4) Gerakan Nasional Pengembangan Agribisnis.

Eksistensi Semua Komponen Sistem Agribisnis Secara Lengkap di Pedesaan

Kelengkapan eksistensi subsistem di lokalita pedesaan adalah syarat yang perlu bagi berlangsungnya kehidupan agribisnis. Eksistensi subsistem yang secara lengkap hadir di lokalita pedesaan tersebut membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya sistem agribisnis, agar mampu menciptakan posisi tawar yang baik sehingga dapat meraih nilai tambah yang maksimal. Kondisi tersebut membuat pelaku sistem agribisnis terlengkapi perangkat fungsionalnya untuk memanfaatkan

sumberdaya secara rasional, efektif dan efisien serta untuk menjadi pelaku niaga yang berjati diri di pasar.

Kondisi tersebut juga diperlukan bagi berkembangnya mekanisme hubungan melembaga yang memberikan kepastian adanya keserasian dan kelancaran arus kerja pada setiap simpul kaitan dari satu subsistem dan subsistem lainnya. Adanya kejelasan tanggung jawab, resiko, dan insentif dari setiap simpul kaitan antar subsistem dalam kerangka sektor alur kerja sistem agribisnis keseluruhan hanya bisa dikembangkan bila subsistem benar-benar ada dan bekerja di lokalita sistem agribisnis.

Wirausaha dan Kemitraan Usaha

Keberadaan komponen subsistem agribisnis secara lengkap di lokalita adalah syarat yang perlu tapi belum cukup. Untuk mencukupi persyaratan keberadaan sistem agribisnis di pedesaan, diperlukan kehadiran wirausaha. Wirausahalah yang menjadi pemrakarsa, perintis, perakit, perekayasa, penggerak dan pemandu proses bekerjanya sistem agribisnis pada lokalita tertentu, sehingga sistem agribisnis tersebut tampil sebagai pelaku ekonomi dalam lingkungannya. Di tangan wirausahalah berlangsungnya proses perakitan dan perekayasaan untuk memanfaatkan keberadaan subsistem tersebut menjadi satuan perangkat sistem agribisnis yang mempunyai jati diri dan dinamika yang diperlukan dalam usahanya untuk meraih nilai tambah yang maksimal dan memiliki daya saing yang tangguh.

Pada setiap subsistem agribisnis yang ada akan terjadi saling interaksi di antara sejumlah wirausaha, yang tentunya harus mengembangkan mekanisme kerjasama melalui hubungan kemitraan dari manajerial yang dirancang, dirakit dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan optimasi bekerjanya sistem agribisnis yang didukung bersama. Melalui hubungan kemitraan yang telah disepakati

itulah akan berkembang suatu sistem agribisnis yang mampu mendistribusikan insentif dan nilai tambah yang didapatnya secara proporsional menurut asas keadilan.

Iklm Lingkungan yang Kondusif

Selama ini terdapat berbagai kendala yang membatasi dunia usaha untuk membangun sistem agribisnis, meskipun sebagian besar dari kendala struktural ekonomi dualistik sudah teratasi dengan adanya strategi transformasi pedesaan yang telah berlangsung. Adanya keterkaitan berbagai pilar menjadikan proses restrukturisasi ekonomi pedesaan dalam rangka mewujudkan wawasan dan sistem agribisnis menjadi kompleks. Kemampuan mengatasi kendala pokok dari hulu sangat memungkinkan membangun keberhasilan program peningkatan produksi. Pada sisi lain, kemampuan mengatasi kendala di sisi hilir memberikan kesempatan terciptanya iklim investasi dan fasilitas yang kondusif.

Gerakan Nasional

Pengembangan Agribisnis

Adanya keempat pilar dalam pengembangan agribisnis memungkinkan terjadinya strategi restrukturisasi pedesaan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan agribisnis. Kondisi ini tercipta sebagai respon kreatif terhadap kondisi lingkungan yang mengandung tantangan dan peluang pemanfaatan sumberdaya dari wilayah tertentu untuk menghasilkan baran dan jasa. Adanya kelengkapan lembaga sistem agribisnis di lokalita pedesaan, iklim dan fasilitas usaha yang kondusif, wirausaha dan sumberdaya manusia yang bersikap dan bermotivasi positif dengan kemampuan dan ketrampilan memadai, merupakan kondisi dinamik yang memungkinkan tumbuhnya agribisnis yang berbasis pada kekuatan masyarakat yang didukung oleh pemrakarsa.

SIMPULAN

Kebijakan dalam mengatasi permasalahan perekonomian saat ini adalah tindakan menyelamatkan ekonomi secara makro, tanpa harus mengorbankan terlalu banyak kepentingan mikro. Hal ini diwujudkan sebagai antisipasi terhadap kesan terjadinya ambivalensi antara dunia usaha dan pengambil keputusan yang sering bertabrakan kepentingan. Dunia usaha merasa kebijakan pemerintah justru membuat mereka makin kelabakan menghadapi tekanan ganda, yakni gejolak rupiah dan uang ketat. Pada sisi lain, pemerintah melihat dunia usaha bergerak aji mumpung untuk memanfaatkan kondisi tersebut dengan cara menguras dolar AS.

Di samping permasalahan ekonomi secara domestik (internal), sebagai konsekuensi hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, maka tekanan perekonomian ternyata tidak hanya pada keseimbangan internal melainkan pada tekanan defisit neraca berjalan, baik untuk impor barang konsumsi, barang modal, bahan baku dan penolong, maupun impor jasa yang dipastikan nilainya akan meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan volume konsumsi maupun selisih nilai kurs rupiah terhadap dollar AS yang semakin tajam. Kondisi ini diperparah dengan keroposnya sektor industri dan rendahnya daya saing global dunia usaha nasional.

Dengan adanya permasalahan besar yang melilit perekonomian, pemerintah tidak mempunyai pilihan lain kecuali membuat

terobosan sektor mana yang sebenarnya memiliki kekuatan pasar cukup besar, industri apa dan bagaimana pola pengembangan, serta penanganan prioritasnya. Karena adanya tekanan terhadap kurs rupiah dan lemahnya daya saing serta berbagai permasalahan industri nasional, maka pilihannya adalah sektor agroindustri. Sektor ini tidak memerlukan kandungan impor tinggi, seluruh bibit dan komoditasnya relatif tersedia, areal yang tersedia masih cukup luas, serta ada kultur kehidupan masyarakat agraris yang mendukung.

Yang menjadi masalah adalah bahwa ternyata kebijakan yang selama ini dijalankan belum memberikan fundamental yang kuat dan iklim yang kondusif. Struktur pasar yang terbentuk secara monopolistik, serta munculnya berbagai kebijakan sektor riil dan sektor perbankan sangat mewarnai usaha-usaha mengembangkan agrobisnis.

Dengan berlandaskan kepada acuan strategi pengembangan agrobisnis yang dirumuskan dan melakukan pengelolaan dengan menerapkan asas desentralisasi, diarahkan untuk mengembangkan usaha tani berkelanjutan, mendorong peningkatan investasi di bidang agribisnis, menciptakan pasar bagi hasil primer serta hasil olahan, menciptakan struktur pemasaran yang efisien serta merekayasa kelembagaan yang tepat dengan kondisi sosial ekonomi di setiap wilayah, maka peranan agrobisnis dapat optimal dalam memberikan kontribusi perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- (1994), *Konsep dan Strategi Pembangunan dalam PELITA VI*. Jakarta, Badan Agribisnis, Departemen Pertanian.
- (1993), "Menanti Gerakan Agribisnis", *Warta Pertanian*, Tahun XI/1993, Jakarta.

- (1994), *Pedoman Pemasarkatan Agribisnis*, Badan Agribisnis, Jakarta, Departemen Pertanian.
- Anwar, Affendi, (1995), "Kajian Kelembagaan untuk Menunjang Pengembangan Agribisnis." *Makalah Seminar*, Bogor.
- Hernanto, Fadholi, (1991), *Ilmu Usahatani*. Jakarta, Penebar Swadaya.
- Jafar, Muhamad, (1994), "Perencanaan Agribisnis." *Makalah Lokakarya Pengembangan Kurikulum Program Studi PWD*, Bogor, Pascasarjana IPB.
- Mubyarto, (1992), *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta, LP3ES.
- Nasution, Ibrahim Lufi, (1994), "Kebijaksanaan Pertanian Nasional dalam Mendukung Bogor, Pembangunan Ekonomi." *Orasi Ilmiah Guru Besar Fakultas Pertanian IPB*.
- Sandy, I Made, (1982), *Pembangunan Wilayah*. Bogor, Miniograf.
- Saragih, Bungaran, (1998), "Pengembangan Agribisnis Berskala Kecil," *Makalah Seminar*, Bogor, Pusat Studi Pembangunan- Lembaga Penelitian IPB.
- Siagian, Renville, (1997), *Pengantar Manajemen Agribisnis*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Soekartawi, (1986), *Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil*, Jakarta, UI-Press
- Soekartawi, (1993), *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Quikey, John, et al, (1988), *Ekonomi Pemasaran dalam Pertanian* Jakarta, Yaysan Obor Indonesia.
- Djojohadikusumo, Sumitro, (1994), *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, LP3ES.
- Glaason, John, (1990), *Pengantar Perencanaan Regional* (terjemahan), Jakarta, LP FE UI.